

Kosmologi Negeri dan Resiliensi Sosial Masyarakat Pulau: Upaya Pengelolaan Konflik dan Damai Keberlanjutan

Fransina Matakena^{1*}, Tonny Donald Pariela¹, Yurnie Darakay¹

¹Universitas Pattimura, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received January 30, 2024

Revised February 29, 2024

Accepted March 14, 2024

Available online April 30, 2024

Kata Kunci:

Pengelolaan Konflik; Damai Berkelanjutan; Ketahanan Masyarakat; Kosmologi Negeri; Resiliensi Sosial

Keywords:

Conflict Management; Sustainable of Peace; Community Resilience; State Cosmology; Social Resilience



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license. Copyright © 2024 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

Haria dan Negeri Porto. Artikel ini memberikan kontribusi pemahaman baru tentang bagaimana nilai-nilai lokal dapat menjadi landasan penting dalam memahami dan mengatasi konflik sosial untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.

ABSTRACT

This article explores a longstanding social conflict on Saparua Island, Maluku, triggered by social envy, competition for land ownership rights, and intergenerational disputes. The research aims to elucidate the island community's cosmology as a form of social resilience to manage conflicts and promote sustainable development. The study focuses on the conflict between the Haria and Porto regions. A qualitative research approach was employed, utilizing in-depth interviews, observations, and literature reviews as data collection techniques. Fifteen informants, including Village Chiefs (Raja Negeri), Elders (Saniri), Community Leaders, Youth Representatives, and Religious Figures from both regions, participated in the study due to their direct involvement in the conflict and resolution processes. The findings reveal that the island community's cosmology is a profound foundation for social values on Saparua Island. These values manifest in conflict resolution efforts through peace monuments, religious rituals, and cultural practices. The community's cosmology also functions as social resilience, which is crucial in conflict management and sustainable development on Saparua Island, particularly in Haria and Porto. This article contributes a fresh understanding of how local values can serve as a crucial framework in comprehending and addressing social conflicts to achieve sustainable development.

1. PENDAHULUAN

Konflik sosial merupakan salah satu realitas objektif yang cukup jamak ditemukan di Provinsi Maluku (Lawalata et al., 2022). Konflik antar negeri dalam satu pulau kerap terjadi dan mencerminkan apa yang disebut sebagai *deep-rooted conflict* (konflik berakar dalam) karena melibatkan identitas negeri yang berbeda-beda (Adedeji, 2022; Kühne, 2020). Perbedaan identitas negeri yang terus mengalami penajaman, dan pada saat yang sama berbagai potensi damai pun mengalami degradasi, menyebabkan timbulnya

*Corresponding author

E-mail addresses: sien.matakena@gmail.com

kerentanan struktur sosial (*vulnerability of social structure*) yang berpengaruh terhadap stabilitas sosial dan keamanan dalam suatu wilayah pulau (Fenanlampir, 2020). Kondisi ini selain menimbulkan kerentanan atau potensi instabilitas wilayah, kurang matangnya relasi-relasi sosial lintas perbedaan identitas negeri, juga menunjukkan tidak berfungsinya *safety valve* sebagai modal sosial di dalam Masyarakat (Nainggolan et al., 2024).

Kajian konflik di Maluku melibatkan sejumlah aspek yang kompleks dan saling terkait, menciptakan sebuah dinamika ketegangan yang perlu dipahami secara holistik. Salah satu faktor utama adalah kesenjangan sosial yang menciptakan ketidaksetaraan ekonomi dan akses terhadap sumber daya (Ayuningtyas et al., 2022; Mubarak et al., 2023; Wahidin et al., 2020). Ristanti, (2022) menyatakan bahwa perbedaan pendapatan antara kelompok-kelompok masyarakat di Maluku menciptakan ketidaksetaraan yang dirasakan, dengan sejumlah kelompok yang terpinggirkan secara ekonomi. Ini tercermin dalam ketidaksetaraan dalam pendapatan, lapangan pekerjaan, dan akses terhadap peluang ekonomi. Selain itu, kesenjangan akses terhadap sumber daya juga menjadi pemicu konflik. Kelompok-kelompok tertentu menghadapi kesulitan dalam mengakses sumber daya alam, termasuk tanah dan perairan, yang dapat merugikan mereka secara ekonomi (Lawalata et al., 2022). Perbedaan dalam pemanfaatan sumber daya ini dapat menciptakan ketidaksetaraan yang dirasakan dan menjadi sumber konflik, terutama ketika distribusi manfaatnya tidak merata. Kurangnya kesempatan ekonomi dan pendidikan bagi beberapa kelompok juga menjadi faktor utama. Kelompok yang kurang mendapatkan akses pendidikan dan pelatihan memiliki peluang ekonomi yang lebih terbatas, meningkatkan ketidaksetaraan dalam hal perkembangan pribadi dan profesional (Tadjoeddin et al., 2021). Kondisi ini tidak hanya menciptakan kesenjangan ekonomi, tetapi juga meningkatkan perasaan ketidakadilan dan ketegangan sosial di antara berbagai kelompok masyarakat di Maluku (Matakena et al., 2020). Untuk menyelesaikan konflik yang muncul dari kesenjangan sosial ini, Amri et al., (2020) dan Ipa et al., (2023) sepakat menyatakan bahwa langkah konkret yang diambil. Dengan peningkatan akses pendidikan dan pelatihan bagi kelompok yang terpinggirkan, guna memberikan mereka kesempatan yang lebih adil dalam pengembangan keterampilan dan kualifikasi. Selanjutnya, program pembangunan ekonomi inklusif diperkenalkan untuk memastikan distribusi manfaat ekonomi yang lebih merata di antara berbagai kelompok masyarakat.

Selain itu, kajian Leiwakabessya et al., (2021) dan Ruhlessin (2021) menyoroti perebutan sumber daya alam dan hak kepemilikan tanah di Maluku sebagai pemicu kompleksitas konflik di wilayah tersebut. Wilayah Maluku, yang kaya akan sumber daya alam, menjadi tempat persaingan yang intens untuk menguasai dan mengendalikan kekayaan alam, terutama perairan yang melimpah dan kekayaan alam lainnya. Ketidakmerataan distribusi manfaat dan praktik eksploitasi yang tidak adil menjadi pemicu utama konflik antar kelompok masyarakat di Maluku (Matitaputty, 2023). Persaingan untuk sumber daya alam menciptakan ketegangan di antara kelompok-kelompok yang bersaing. Ketika distribusi manfaat dari eksploitasi sumber daya alam tidak merata, hal ini dapat memperburuk kesenjangan sosial dan memicu konflik (Far, 2022; Leiwakabessya et al., 2021; Sumardi, 2021). Kelompok yang merasa dianiaya atau tidak mendapatkan manfaat yang adil dapat merespon dengan protes dan resistensi, menciptakan dinamika konflik yang rumit (Ruhlessin, 2021b). Disamping itu, perebutan hak kepemilikan tanah menjadi faktor yang signifikan sebagai penyebab konflik (Sumardi, 2021). Kadir (2023) menyampaikan bahwa persoalan agraria, klaim tanah tradisional, dan ketidakjelasan regulasi mengenai kepemilikan tanah menciptakan perselisihan antar kelompok masyarakat. Konflik tidak hanya terbatas pada tingkat lokal, tetapi juga melibatkan komunitas *Negeri* atau Desa yang memiliki klaim atas tanah yang sama (Ruhlessin, 2021b). Ketidakpastian hukum dan kebijakan agraria yang ambigu menciptakan celah bagi konflik dan persaingan atas hak kepemilikan tanah, meningkatkan tingkat ketidakstabilan sosial. Penyelesaian yang ditawarkan berupa perlu memperkuatnya regulasi dan penegakan hukum terkait kepemilikan tanah dan eksploitasi sumber daya alam (Ruhlessin, 2021b, 2021a). Hal ini akan menciptakan kerangka kerja yang jelas dan adil untuk pengelolaan sumber daya alam dan tanah. Selain itu, Muin & Rakuasa (2023) menambahkan perlunya program pelibatan masyarakat untuk menciptakan kesepahaman dan mengelola konflik secara damai. Dialog antar kelompok masyarakat dan pemangku kepentingan dapat menciptakan kesepahaman bersama tentang pengelolaan sumber daya alam dan tanah, mengurangi potensi konflik (Batiran & Salim, 2020; Muin & Rakuasa, 2023).

Disamping itu juga ada kajian tentang konflik antar agama di Maluku (Lattu, 2023; Rahawarin, 2023; Sienkiewicz, 2022; Somers, 2020), terutama di pulau Ambon dan Halmahera, merupakan gejala kompleks yang tidak hanya terbatas pada dimensi keagamaan, tetapi juga terkait erat dengan faktor etnis-politik dan ketidakpuasan sosial politik (Amrullah, 2021; Rahawarin et al., 2021). Yunanto & Damayanti (2021) menyampaikan bahwa meskipun sering diidentifikasi sebagai konflik agama, konflik di Maluku pada dasarnya berakar dari perselisihan terkait sumber daya alam, perebutan hak kepemilikan tanah, dan ketidaksetaraan ekonomi. Sentimen perbedaan agama kemudian diangkat sebagai alat untuk memperdalam perpecahan di tengah kondisi sosial dan politik yang tidak stabil (Hasudungan, 2021;

Yunanto & Damayanti, 2021). Konflik ini dapat dilihat sebagai ekspresi ketidakpuasan terhadap kondisi sosial dan politik yang tidak merata, di mana ketidaksetaraan ekonomi dan kurangnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan menjadi faktor pendorong utama (Amrullah, 2021; Rahawarin et al., 2021). Rahawarin (2023) menyatakan bahwa penyelesaian konflik memerlukan pendekatan holistik, melibatkan langkah-langkah untuk meningkatkan kesetaraan ekonomi, memperkuat pemberdayaan masyarakat, serta merangsang dialog antaragama dan rekonsiliasi untuk membangun dasar perdamaian yang berkelanjutan di wilayah tersebut.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, artikel ini mendeskripsikan bahwa konflik sosial di Maluku juga dapat terjadi pada komunitas agama yang sama, wilayah dan budaya yang sama, namun konfliknya terjadi dalam kurun waktu yang lama dan berlarut-larut. Artikel ini mengkaji konflik social yang terjadi di Pulau Saparua, Maluku, konflik antara Negeri Haria dan Negeri Porto. Artikel ini menyoroti bahwa meskipun keduanya menganut Agama Kristen, konflik yang terjadi dalam rentang tahun 2002 hingga 2013 menunjukkan adanya dinamika yang meruncing, bahkan dalam wilayah yang geografisnya berdekatan dan berbatasan langsung. Awalnya, konflik tersebut muncul dari perebutan klaim atas sumber air bersih yang sangat vital bagi kedua negeri, yaitu "Air Raja," serta klaim atas batas wilayah petuanan. Persaingan untuk menguasai sumber daya tersebut menjadi titik awal terjadinya pertentangan, yang kemudian memicu ketegangan sosial di antara kedua komunitas. Namun, penyebab konflik semakin rumit seiring berjalannya waktu. Konflik tidak hanya terbatas pada perebutan sumber daya alam dan hak kepemilikan tanah, melainkan juga mencakup perkelahian muda-mudi tanpa sebab yang jelas. Kondisi ini menciptakan suasana yang semakin memanas dan sulit untuk diatasi, karena pertikaian semakin berkembang menjadi bentuk agresi yang tidak beralasan. Selain itu, saling serang antar wilayah tanpa sebab yang jelas menunjukkan adanya eskalasi emosional dan kurangnya komunikasi yang baik di antara masyarakat setempat. Konflik semakin meluas, melibatkan tidak hanya elemen-elemen konkrit seperti sumber daya alam dan tanah, tetapi juga konfrontasi yang didorong oleh faktor psikososial di antara generasi muda.

Selain itu, artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan kosmologi negeri masyarakat pulau sebagai bentuk resiliensi sosial dalam upaya pengelolaan konflik dan pembangunan berkelanjutan di Pulau Saparua. Kosmologi negeri dapat diartikan sebagai nilai sosial tentang kecintaan terhadap negeri yang terdapat dalam alam bawah sadar kolektif masyarakat (Matakena et al., 2023, p. 3). Artikel ini berpendapat bahwa kosmologi negeri Masyarakat pulau inilah yang mendorong terciptanya perdamaian antara kelompok yang berkonflik. Di Pulau Saparua sendiri, kosmologi negeri pengelolaan konflik dijewantahkan dalam bentuk tugu perdamaian, ritual agama dengan Ibadah *Koinonia*, dan budaya local seperti tarian *cakalele* dan *Soa* sebagai ikatan kekerabatan Negeri. Kosmologi Negeri inilah yang menjadi resiliensi social Masyarakat pulau dalam pengelolaan konflik dan Pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini berkontribusi untuk memperkuat dan menambah pemahaman mengenai upaya pengelolaan konflik di Maluku melalui konsep kosmologi negeri masyarakat pulau sebagai resiliensi sosial. Selain itu, peneliti memberikan contoh bahwa Negeri Haria dan Negeri Porto di Pulau Saparua, Maluku sebagai model tentang pengelolaan konflik dan pembangunan berkelanjutan dengan pemahaman kosmologi negeri masyarakat pulau.

2. METODE

Metode penelitian yang diimplementasikan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif (Creswell, 2017). Teknik pengumpulan data mencakup wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis studi pustaka. Penelitian ini dilakukan di Pulau Saparua, Maluku, dengan fokus khusus pada konflik yang terjadi antara Negeri Haria dan Negeri Porto, dua entitas masyarakat dengan kosmologi yang memainkan peran sentral dalam upaya pengelolaan konflik dan Pembangunan keberlanjutan. Sejumlah 15 informan yang terlibat dalam penelitian ini dipilih secara purposif dan mencakup Raja Negeri, Saniri, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, dan Tokoh Agama dari kedua negeri. Mereka dipilih karena peran langsung mereka dalam konflik dan proses penyelesaiannya. Instrumen wawancara mendalam dikembangkan dengan mempertimbangkan aspek pengalaman informan selama tiga tahap utama konflik: proses awal konflik, masa konflik, dan penyelesaian konflik. Pertanyaan dirancang untuk menggali pemahaman mendalam mengenai bagaimana kosmologi negeri sebagai resiliensi sosial masyarakat pulau dalam pengelolaan konflik dan pembangunan berkelanjutan di Pulau Saparua, Maluku.

Proses reduksi data merupakan tahap kritis dalam menggali pemahaman mendalam dari informasi yang dikumpulkan. Transkripsi wawancara menjadi langkah awal yang memerlukan ketelitian untuk memastikan bahwa setiap aspek percakapan terdokumentasi dengan baik. Setelah itu, dilanjutkan dengan pengkodean tematik, di mana setiap segmen data diberi label sesuai dengan tema atau kategori tertentu. Proses ini memungkinkan untuk pengelompokan data, memfasilitasi identifikasi temuan utama dan pola-pola umum. Analisis tematik mempertajam pemahaman dengan mengeksplorasi hubungan antar-tema dan menarik makna yang muncul dari data kualitatif tersebut.

Penyajian data menjadi langkah penting dalam merinci temuan utama. Data disusun dengan cermat untuk menciptakan narasi yang koheren, disertai dengan kutipan langsung dari informan untuk memberikan dukungan dan kekayaan pada temuan. Setiap temuan dijelaskan dalam konteks kosmologi negeri, memperkuat pemahaman terhadap nilai sosial yang menjadi dasar kesadaran kolektif masyarakat. Hubungan antara temuan dan konsep resiliensi sosial dibahas secara rinci, mengilustrasikan bagaimana nilai-nilai tersebut memainkan peran kunci dalam menjaga kestabilan masyarakat di Pulau Saparua. Proses penarikan kesimpulan merupakan langkah sintesis, di mana temuan utama diangkat dan dihubungkan dengan tujuan penelitian. Interpretasi dilakukan dengan mempertimbangkan implikasi hasil penelitian terhadap upaya pengelolaan konflik dan pembangunan keberlanjutan di Pulau Saparua. Validasi data melibatkan metode triangulasi, di mana temuan dari berbagai sumber dan teknik pengumpulan data dibandingkan untuk memastikan konsistensi dan keabsahan interpretasi. Hasil penelitian dikembalikan kepada informan sebagai upaya tambahan untuk memastikan keakuratan dan kesesuaian hasil dengan pengalaman mereka. Literatur mendukung penelitian dengan menyediakan landasan teoritis dan konseptual yang mendalam, memperkuat kevalidan temuan dan memberikan dasar bagi kedalaman analisis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pergulatan Identitas: Agama, Tanah, dan Konflik Sosial di Pulau Saparua

Konflik di Maluku, terutama di Ambon, seringkali disajikan sebagai pertikaian berkepanjangan antara kelompok Muslim dan Kristen (Gaspersz, 2023; Riyanto, 2023), namun kenyataannya jauh lebih kompleks. Pasca-jatuhnya rezim Soeharto pada tahun 1998, Maluku menjadi saksi konflik merusak yang merenggut banyak nyawa. Puncaknya terjadi dari tahun 1999 hingga 2002, mengakibatkan hampir 5.000 kematian dan mengungsi sepertiga penduduk Maluku dan Maluku Utara. Meskipun konflik ini sering diidentifikasi sebagai konflik agama, sebenarnya memiliki akar yang lebih dalam, melibatkan faktor-faktor politik dan ekonomi yang signifikan. Politisasi agama menjadi pemicu utama ketegangan antar kelompok agama, menciptakan dinamika yang menghancurkan stabilitas sosial (Dandirwalu & Rehy, 2020). Pandangan yang menyatakan bahwa konflik ini tidak semata-mata berasal dari perbedaan agama tetap menjadi perdebatan, namun agama tetap menjadi variabel dominan yang memengaruhi perkembangan konflik (Amri et al., 2020).

Tidak hanya terjadi di Ambon, konflik ini juga menyebar ke Maluku Utara. Kedatangan pengungsi dari Ambon memperumit situasi, dan konflik meluas di berbagai wilayah di Maluku Utara, terutama antara pemuda desa Talaga dan desa Bataka di kecamatan Ibu, Halmahera Barat, berlangsung dari Agustus 1999 hingga Juni 2001, dengan korban jiwa dan kerugian material yang signifikan (Kerebungu & Fathimah, 2023). Faktor-faktor yang mencetuskan konflik agama di Maluku melibatkan ketidakstabilan politik dan ekonomi pasca-jatuhnya Soeharto, devaluasi rupiah, kesenjangan sosial, perebutan sumber daya alam, dan perselisihan elit politik serta birokrasi (Matitaputty, 2023; Niemeijer, 2021). Meskipun sering dijuluki sebagai "konflik agama," sebagian masyarakat meyakini bahwa konflik tersebut lebih kompleks dan melibatkan variabel politik dan ekonomi yang kuat. Politisasi agama menjadi kunci dalam konflik ini, di mana agama dimanipulasi untuk menciptakan dan memperpanjang ketegangan. Tingkat sensitivitas tinggi terhadap isu agama di wilayah tersebut menciptakan persepsi bahwa konflik ini adalah perang antara umat Islam dan Kristen, walaupun ada pandangan lain yang menyatakan bahwa konflik tersebut melibatkan faktor politik dan ekonomi yang signifikan (Lawalata et al., 2022; Matakena et al., 2020).

Berbeda dengan situasi di konflik di Maluku secara umum, konflik di Pulau Saparua antara Negeri Haria dan Negeri Porto mengungkapkan dinamika yang lebih kompleks, melampaui sekadar perbedaan agama. Kedua negeri ini, dari perspektif sosio-religiusitas, merupakan komunitas penganut agama Kristen. Konflik antara Negeri Haria dan Negeri Porto mengakar pada masalah perbatasan wilayah petuanan serta saling klaim atas sumber air yang bernama "Air Raja." Sekretaris Negeri Porto, ML, menyatakan dengan tegas bahwa pertikaian ini bersumber dari perselisihan mengenai kepemilikan wilayah dan hak atas sumber daya alam. Menurutnya, klaim Negeri Porto lebih kuat karena mereka berhasil memenangkan persidangan terkait sengketa tanah di Saparua pada masa kolonial. Akar penyebab konflik semakin kompleks karena kedua belah pihak, baik Haria maupun Porto, sama-sama bersikeras mengklaim kepemilikan yang sah atas "Air Raja." Konflik tersebut telah mencapai tingkat ketegangan yang tinggi, ditandai dengan seringnya pertikaian fisik antara kedua negeri, termasuk penggunaan bom dan senjata api. Bahkan, konflik tersebut telah mengakibatkan kerusakan yang signifikan, seperti terbakarnya baileu (Rumah Adat) Haria pada tahun 2002.

Permasalahan semakin rumit ketika Negeri Porto mengungkit isu terkait status tanah di daerah *Alang-Alang*. Menurut pernyataan Raja Porto, Haria, yang memiliki penduduk padat namun wilayah yang sempit, tidak lagi memiliki lahan yang cukup untuk melakukan ekspansi wilayahnya. Raja Porto bahkan mengusulkan satu-satunya solusi untuk mengatasi keterbatasan ini, yaitu dengan meminjam tanah dari

negeri lain, terutama dari Haria. Pernyataan ini, seperti yang disampaikan oleh seorang tokoh masyarakat Haria yang bernama NH, menyoroti bahwa masalah perbatasan dan klaim wilayah tidak hanya berdampak pada konflik terkait sumber air, tetapi juga melibatkan isu yang lebih luas terkait dengan status tanah di wilayah tersebut. Menurut NH, masyarakat Haria merasa prihatin dan keberatan dengan usulan Raja Porto karena hal ini bisa memperburuk ketegangan antara kedua negeri dan membahayakan kedaulatan wilayah Haria.

Tidak hanya sebatas itu, bagi masyarakat Negeri Haria dan Negeri Porto, wilayah petuanan memiliki makna yang mendalam. Secara sosiologis, mereka tidak hanya melihatnya sebagai sebidang tanah dengan fungsi ekonomi semata, tetapi juga sebagai tempat sakral yang menyimpan warisan nenek moyang. Wilayah petuanan dianggap sebagai cagar budaya yang mencerminkan identitas dan keberlanjutan tradisi masyarakat. Selain itu, "Air Raja" tidak hanya dianggap sebagai penyedia air untuk masyarakat Negeri Haria dan Porto, melainkan memiliki makna simbolis sebagai lambang penguasaan wilayah. Dalam pandangan masyarakat setempat, kontrol atas "Air Raja" menjadi representasi dominasi terhadap wilayah; siapa yang menguasainya, dianggap sebagai penguasa wilayah tersebut.

KT, seorang tokoh masyarakat Negeri Porto yang memiliki pengaruh besar, menyampaikan bahwa makna sakral tanah petuanan bagi masyarakatnya. Dalam pandangannya, tanah petuanan bukan hanya sekadar sumber kehidupan ekonomi, melainkan juga tempat yang dipandang suci karena menyimpan warisan nenek moyang. KT dengan tegas menyatakan bahwa tanah petuanan harus mereka pertahankan, bahkan jika itu berarti harus bertumpahan darah. Pernyataan ini mencerminkan komitmen kuat untuk mempertahankan nilai-nilai leluhur dan keberlanjutan tradisi di tengah tantangan modern. Lebih jauh, KT menekankan bahwa "Air Raja" bukan sekadar sumber air, melainkan memiliki makna mendalam sebagai simbol kekuasaan seorang raja penguasa negeri. Dalam pemikirannya, menguasai sumber air ini bukan hanya mengamankan pasokan air, tetapi juga membawa kekuasaan simbolis yang dapat memengaruhi status dan pengakuan suatu negeri. Pernyataannya mencerminkan persepsi yang kuat akan pentingnya tanah petuanan dan "Air Raja" sebagai bagian integral dari identitas dan kekuasaan masyarakat Negeri Porto.

Dari konflik antara Negeri Haria dengan Negeri Poto terlihat bahwa persaingan dan sengketa wilayah petuanan yang membawa nilai simbolis dan sejarah yang dalam bagi masyarakat setempat. Perbedaan ini menjadi penegasan terhadap klaim bahwa akar konflik di Maluku tidak terbatas pada perbedaan agama, tetapi juga terkait dengan dinamika rumit terkait kepemilikan dan penguasaan wilayah petuanan. Konflik di Pulau Saparua memberikan gambaran lebih lanjut bahwa pertentangan antara Negeri Haria dan Negeri Porto tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga mengandung dimensi simbolis dan historis yang sangat kompleks. Wilayah petuanan, yang menjadi fokus utama perselisihan, bukan hanya sekadar lahan produktif atau sumber daya ekonomi, melainkan juga sebuah kawasan yang dianggap suci dan sarat makna warisan nenek moyang. Persaingan ini melibatkan klaim simbolis dan historis yang diperkuat oleh pandangan masyarakat setempat terhadap wilayah mereka.

Dalam telaah sosiologi, konflik Negeri Haria dan Negeri Porto yang berakar pada tanah dan air yang bermakna sakral dan pembentuk identitas diri mereka. Randall Collins, salah seorang ahli sosiologi, menyumbangkan pandangan ini melalui teorinya tentang konflik mikrososial, di mana simbol dan ritual dianggap sebagai elemen kunci dalam pembentukan hubungan sosial (Al Hourani, 2021). Collins (2022) menekankan bahwa konflik sering kali timbul ketika simbol-simbol yang mencerminkan identitas kelompok tertentu dihadapkan pada ancaman dari tindakan atau interaksi kelompok lain. Ini tidak hanya sebatas pertarungan fisik atau distribusi sumber daya materi, tetapi melibatkan pertarungan simbolik untuk merumuskan dan mempertahankan makna sosial dari identitas kelompok.

Hal itu juga senada dengan Alexander, (2022) dan Seidman & Alexander (2020) melanjutkan konsep ini dengan menekankan bahwa konflik bukan hanya seputar sumber daya fisik, tetapi juga terkait dengan makna sosial. Identitas kelompok, simbol, dan narasi menjadi unsur kunci dalam pemahaman konflik sosial. Dalam konteks perebutan wilayah yang memiliki makna simbolis, konflik muncul ketika kelompok atau masyarakat merasa identitas mereka terancam. Wilayah dalam hal ini bukan hanya representasi geografis, tetapi juga simbol kekuasaan, sejarah, atau identitas budaya. Konflik dipicu oleh persepsi bahwa wilayah tersebut adalah bagian integral dari identitas kelompok (Alexander, 2020). Jika kelompok merasa bahwa kepemilikan atau kendali atas wilayah tersebut adalah manifestasi dari kekuatan atau sejarah budaya mereka, maka konflik dapat berkembang sebagai upaya untuk mempertahankan atau merebut kembali wilayah tersebut. Konflik simbolik melibatkan pertarungan makna dan identitas, dan wilayah menjadi pangkal konflik ketika dianggap sebagai simbol yang mengancam integritas identitas kelompok. Melalui pandangan ini, teori konflik simbolik memberikan wawasan lebih mendalam tentang dinamika sosial yang melibatkan pertarungan simbolik dalam membentuk dan mempertahankan identitas kelompok dalam konteks perebutan wilayah yang bermakna simbolis.

Kosmologi Negeri dan Upaya Penyelesaian Konflik di Pulau Saparua

Kosmologi negeri dalam masyarakat pulau di Maluku, terutama masyarakat pulau Saparua, mencerminkan suatu konsep yang kaya akan keyakinan dan pandangan terhadap alam semesta yang melibatkan dimensi spiritual, sosial, dan budaya (Watloly, 2022). Dalam sudut pandang kosmologi orang Pulau Saparua, hierarki manusia tergambar dengan jelas, di mana Allah (Upu) berada di puncak, diikuti oleh leluhur (Terse Nene Moyang), dan kemudian manusia. Dalam pemahaman kosmologi tersebut, kosmos dianggap sebagai ruang hidup yang sakral, tertib, dan teratur. Berbagai elemen alam semesta, seperti gunung, tanah, air, dan laut, dianggap memiliki kejiwaan. Masyarakat di Pulau Saparua tidak melihat kosmos sebagai entitas terpisah dari masyarakat, tetapi mereka memandang keduanya sebagai keterkaitan erat. Konsep ini menciptakan pandangan yang holistik terhadap kehidupan, di mana manusia dianggap sebagai bagian integral dari keseluruhan tatanan alam semesta.

Pentingnya hubungan antara manusia dan alam semesta terlihat dalam keyakinan kuat masyarakat Pulau Saparua terhadap keteraturan dan ketertiban kosmos. Alam semesta dianggap sebagai kesatuan yang sakral, dan masyarakat meyakini bahwa hubungan harmonis antara manusia dan alam semesta adalah kunci keberlanjutan kehidupan. Pandangan ini mencerminkan sikap hormat dan kecintaan terhadap alam yang dianggap sebagai bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Kosmologi negeri di Pulau Saparua juga mencakup nilai-nilai budaya yang berperan dalam penyelenggaraan negeri. Konsep ini merujuk pada kesadaran kolektif masyarakat terhadap keberlanjutan dan kelestarian tanah air mereka. Selain itu, kosmologi negeri juga mencakup nilai-nilai sosial, seperti gotong-royong, solidaritas, dan kebersamaan, yang menjadi dasar dalam menjaga keseimbangan antara manusia, alam, dan spiritualitas. Dengan kata lain, kosmologi negeri di Pulau Saparua tidak hanya merupakan pandangan tentang alam semesta, tetapi juga mencakup nilai-nilai dan norma-norma yang membentuk dasar dari kehidupan sosial dan budaya masyarakat setempat.

Kosmologi negeri di Maluku menciptakan suatu kerangka yang mencakup pemahaman mendalam tentang alam semesta, hierarki manusia, dan nilai-nilai budaya yang berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, kerangka ini juga memberikan fondasi untuk lembaga-lembaga tradisional seperti Soa, Lahatol, dan Pela yang memainkan peran vital dalam penyelesaian konflik dan membangun perdamaian di antara Negeri di Pulau Saparua. Soa, sebagai kumpulan beberapa marga yang memiliki hubungan saudara, mencerminkan sikap hidup kekeluargaan yang dikenal dengan Lahatol. Budaya Lahatol muncul sebagai tanggapan terhadap kehidupan masyarakat yang serba kekurangan. Dalam praktiknya, Lahatol tidak hanya terbatas pada satu matarumah tetapi dapat melibatkan kepala keluarga dari matarumah lain, dengan pentingnya hubungan darah sebagai ukuran dalam praktek budaya Lahatol. Selain itu, Pela sebagai sistem persaudaraan antar-keluarga atau antar-masyarakat yang bersifat saling membantu dan melindungi, memperkuat hubungan sosial dan solidaritas di antara kelompok-kelompok masyarakat di Pulau Saparua. Konsep Pela mencerminkan nilai-nilai saling mendukung dan bekerja sama dalam kehidupan sehari-hari, menjadi landasan penting dalam menjaga harmoni dan keseimbangan sosial.

Kosmologi negeri yang terlembagakan pada Negeri Haria dan Negeri Porto menjadi kunci penyelesaian konflik. Pendekatan ini berakar dalam keyakinan bahwa berdamai menciptakan suasana tanpa kekerasan, terwujudnya harmoni, toleransi, saling menghargai, dan relasi yang setara antar individu maupun komunitas. Pemahaman ini tidak hanya berhenti pada tingkat konsep, tetapi diimplementasikan dalam lembaga-lembaga tradisional dan budaya sehari-hari masyarakat Pulau Saparua secara khususnya. AH, seorang tokoh masyarakat Negeri Haria yang ikut terlibat langsung dalam proses musyawarah perdamaian menyampaikan bahwa pemahamannya mengenai perdamaian sebagai suatu konstruksi sosial yang dinamis. AH menekankan bahwa perdamaian bukanlah sekadar tahapan rekonstruksi perjanjian semata, tetapi merupakan proses holistik dan menyeluruh yang melibatkan transformasi dari konflik menuju perdamaian. Dalam kerangka ini, AH menggambarkan bahwa pembangunan perdamaian bukan hanya mencakup aspek fisik, tetapi lebih jauh lagi, mencakup nilai-nilai sosial dan psikologis. Menurutnya, transformasi yang diperlukan untuk mengelola potensi kekerasan baru harus melibatkan perubahan nilai-nilai negatif menjadi nilai-nilai positif. AH menunjukkan bahwa pendekatan ini melibatkan semua aspek kehidupan, mencakup dimensi psikologi, spiritual, relasi sosial, ekonomi, politik, dan budaya.

Dalam merinci pendekatan holistik tersebut, AH menjelaskan bahwa upaya pembangunan perdamaian harus melibatkan pembangunan hubungan yang kuat antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Ini bukan hanya tentang mencapai kesepakatan formal, tetapi juga membangun kembali hubungan yang lebih mendalam dalam konteks psikologi individu, dimensi spiritual, relasi sosial antar komunitas, aspek ekonomi, dinamika politik, dan nilai-nilai budaya. AH menyoroti pentingnya memahami bahwa perdamaian bukanlah tujuan statis, melainkan sebuah proses yang terus-menerus berubah. Proses ini harus menciptakan transformasi positif dalam pola pikir, sikap, dan nilai-nilai masyarakat, sehingga perdamaian yang tercipta lebih substansial dan berkelanjutan.

Hal senada juga disampaikan oleh JT, seorang tokoh masyarakat dari Negeri Porto yang turut terlibat langsung dalam proses perjanjian perdamaian yang menyampaikan pandangannya tentang arti perdamaian. JT dengan tegas menyatakan, "Berdamai itu enak didengar dan indah dibayangkan." Dalam ungkapan ini, JT merinci bahwa damai bukan hanya sekedar kata-kata atau konsep, melainkan sebuah pengalaman yang membawa nuansa positif dan penuh kebahagiaan. Menurut JT, damai identik dengan suasana tanpa kekerasan, menciptakan harmoni, memupuk toleransi, serta mendorong saling menghargai dan menjalani relasi yang setara antar individu dan komunitas. Pemahaman ini mencerminkan pandangan bahwa perdamaian bukan hanya tentang ketiadaan konflik fisik, tetapi juga mencakup aspek-aspek psikologis, sosial, dan kultural yang membangun hubungan yang sehat di antara masyarakat yang hidup bersama. JT menekankan pentingnya perdamaian sebagai suatu harapan. Baginya, perdamaian bukanlah sesuatu yang dapat dicapai secara instan, tetapi merupakan proses yang melibatkan usaha bersama untuk mengikis konflik-konflik yang telah terjadi. Beliau menyampaikan bahwa kedua Negeri, Haria dan Porto, memiliki keinginan bersama untuk menciptakan ketenangan hati secara perlahan. Proses ini diharapkan mampu menumbuhkan keharmonisan dalam kehidupan sehari-hari di Negeri Haria dan Negeri Porto. Melalui ungkapan JT, tergambar bahwa upaya mencapai perdamaian bukan hanya sebatas penyelesaian formal suatu konflik, tetapi juga merangkul makna mendalam dari perdamaian itu sendiri. Dalam pandangan JT, perdamaian membawa makna positif yang mencakup kesejahteraan, keharmonisan, dan keadilan di tengah-tengah masyarakat yang berusaha hidup bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Sebagai akibatnya, kosmologi negeri bukan hanya menjadi pandangan filosofis, tetapi juga menjadi dasar untuk membangun masyarakat yang damai dan harmonis di tengah kompleksitas perbedaan yang ada. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai ini dalam penyelesaian konflik, masyarakat Pulau Saparua menjunjung tinggi tradisi yang mengarah pada perdamaian, keadilan, dan kerjasama bersama.

Tugu Perdamaian, Budaya, dan Agama sebagai Resiliensi Sosial Masyarakat Pulau Saparua

Resiliensi sosial, dalam konteks pengelolaan konflik, mencerminkan kapasitas individu atau kelompok untuk beradaptasi, bertahan, dan pulih dari situasi sulit atau konflik yang mungkin terjadi (Qamar, 2022). Dari sudut pandang bahasa, istilah "resiliensi" mengandung arti daya pegas atau kegembiraan, dan dalam konteks manusia, hal ini mengacu pada kemampuan untuk "bangkit kembali" dari pengalaman negatif. Definisi ini mencakup aspek bawaan individu dan hasil pembelajaran serta pengalaman. Faktor-faktor yang mendukung resiliensi melibatkan dukungan eksternal, kekuatan personal, kemampuan sosial, dan faktor protektif dari individu, keluarga, dan komunitas (Moya & Goenechea, 2022). Ahli sosial, seperti Erik Erikson, memberikan kontribusi signifikan dalam pemahaman resiliensi sosial (Gross, 2020; Sekowski, 2022). Menurut Erikson (2018, p. 48) resiliensi sosial tidak hanya mencakup adaptasi terhadap perubahan, tetapi juga melibatkan pengembangan identitas dan hubungan yang sehat dengan lingkungan sosial.

Perspektif Erikson (2018, p. 49) menyoroti pentingnya hubungan sosial yang kuat, terutama selama konflik. Dalam pandangannya, individu dengan jaringan dukungan sosial yang solid lebih mampu mengatasi stres dan trauma yang mungkin timbul. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan juga dianggap sebagai sarana untuk membangun resiliensi yang berkelanjutan, menciptakan ikatan yang lebih kuat antara individu dan komunitasnya. Bandura (2015, 2018) seorang psikolog sosial terkemuka, juga memberikan perspektif berharga tentang resiliensi sosial. Menurutnya, kekuatan personal dan *self-efficacy*, atau keyakinan diri dalam mengatasi tantangan, memainkan peran kunci dalam membangun resiliensi sosial. Bandura (2015, 2018) menekankan pentingnya memberdayakan individu untuk mengembangkan keterampilan sosial, mengelola emosi, dan mengatasi hambatan yang muncul selama konflik. Pandangan ini menunjukkan bahwa individu yang memiliki keyakinan diri yang tinggi akan lebih cenderung berhasil mengatasi dampak konflik.

Berbeda dengan resiliensi sosial pasca konflik yang terjadi pada Negeri Haria dan Negeri Porto di Pulau Saparua. Disini diperlihatkan sikap yang kuat dalam mengatasi dan bangkit dari traumatis konflik yang pernah melanda mereka. Kedua kelompok tersebut merasakan suasana aman dan pulih kembali, yang tercermin melalui simbol-simbol seperti Tugu Perdamaian Negeri Haria-Porto, penguatan budaya, dan ketaatan dalam agama. Tugu Perdamaian Negeri Haria-Porto menjadi simbol yang sangat bermakna bagi kedua negeri tersebut, tidak hanya dalam konteks sejarah tetapi juga dalam konteks budaya masyarakat kepulauan. Dibangun sebagai lambang perdamaian, kesatuan, dan harapan akan masa depan yang lebih baik, Tugu Perdamaian Negeri Haria-Porto menjadi pusat penganangan terhadap peristiwa bersejarah dan sekaligus monumen untuk menghormati korban-korban konflik antara kedua negeri tersebut.

Lebih dari sekedar menjadi struktur fisik, Tugu Perdamaian Negeri Haria-Porto mencerminkan semangat rekonsiliasi dan kesatuan. Melalui keberadaannya, tugu ini menjadi simbol upaya bersama untuk mewujudkan perdamaian. Harapannya adalah agar masyarakat dapat mengambil hikmah dari masa lalu, membangun kedekatan antarindividu atau kelompok, serta merayakan nilai-nilai perdamaian dan

persatuan. JT, seorang tokoh masyarakat dari Negeri Porto, memberikan makna mendalam terhadap Tugu Perdamaian Negeri Haria-Porto. Baginya, tugu tersebut bukan sekadar suatu struktur fisik, melainkan lambang yang mengandung pesan perdamaian, kesatuan, dan harapan akan masa depan yang lebih baik. Dalam pandangannya, tugu perdamaian tidak hanya menjadi pusat penganangan terhadap peristiwa bersejarah, tetapi juga menjadi monumen yang memperingati korban-korban konflik antara Negeri Haria dan Negeri Porto. Menurut JT, Tugu Perdamaian memiliki arti yang mendalam sebagai simbol perdamaian yang abadi. Tugu ini menjadi representasi konkret dari upaya bersama kedua negeri untuk mengakhiri konflik dan membangun suasana harmonis. Keberadaannya mencerminkan tekad untuk meninggalkan masa lalu yang konflik dan membuka lembaran baru menuju masa depan yang lebih baik.

Bagi JT, damai memiliki makna yang indah dan identik dengan suasana tanpa kekerasan. Dia merinci bahwa dalam konteks perdamaian, terwujudnya harmoni, toleransi, saling menghargai, dan relasi yang setara antar individu dan komunitas yang hidup bersama adalah kunci. Melalui tugu perdamaian ini, JT melihatnya sebagai simbol komitmen untuk mencapai tujuan bersama dalam suatu wilayah tertentu. Tugu tersebut menjadi saksi bisu dari perjalanan panjang menuju perdamaian, serta merupakan monumen yang memancarkan pesan positif dan optimisme untuk masa depan. Baginya, Tugu Perdamaian Negeri Haria-Porto bukan hanya sekadar struktur fisik yang berdiri di tengah-tengah kota, melainkan juga sebagai penanda penting perjalanan kolektif menuju perdamaian. Dalam setiap sudut patung dan reliefnya, JT melihat cerita tentang tekad, pengorbanan, dan harapan untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat Negeri Haria dan Negeri Porto (Gambar 1).



Gambar 1. Tugu Perdamaian Negeri Haria-Porto

Selain Tugu Perdamaian, penguatan budaya juga mempunyai peranan besar dalam proses resiliensi sosial di Negeri Haria dan Negeri Porto. Penguatan budaya memiliki peran penting dalam meredakan ketegangan sosial dan membangun resiliensi masyarakat. Selain mengandalkan pendekatan keamanan, penanganan konflik di masyarakat Pulau Saparua, juga memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Pendekatan kesejahteraan diimplementasikan melalui pembinaan masyarakat untuk mengembangkan potensi lokal seperti rempah-rempah dan sumber daya kelautan, yang merupakan kekayaan masyarakat Pulau Saparua. Ini bukan hanya memperkuat ekonomi lokal tetapi juga memberikan fondasi bagi proses resiliensi sosial. Pemulihan ekonomi lokal diintegrasikan dengan proses rekonsiliasi, menciptakan kondisi di mana masyarakat dapat bersama-sama membangun kesejahteraan dan meredakan konflik. Sebagai contoh budaya yang memiliki dampak positif dalam rekonsiliasi konflik sosial di Pulau Saparua, terdapat tari Cakalele. Tarian perang tradisional ini melibatkan gerakan dinamis dan penuh semangat. Dalam konteks rekonsiliasi, tarian Cakalele bukan hanya sekadar seni pertunjukan, tetapi menjadi simbol persatuan, keberanian, dan semangat untuk mengakhiri konflik. Melalui gerakan-gerakan yang enerjik dan harmonis dalam tari Cakalele, pesan perdamaian dan kesatuan dapat disampaikan dengan kuat kepada masyarakat.

Dengan memperkuat nilai-nilai budaya seperti tari Cakalele, masyarakat Pulau Saparua dapat membangun kedekatan antarindividu atau kelompok. Selain itu, melalui perayaan keragaman budaya, mereka menciptakan ruang dialog yang diperlukan untuk meredakan konflik sosial. Budaya lokal, seperti tari Cakalele, menjadi sarana yang efektif untuk mempererat hubungan antarwarga, menciptakan ruang dialog, dan membangun kepercayaan yang diperlukan untuk meredakan konflik sosial dengan lebih efektif dan berkelanjutan. Dengan menghargai dan memperkuat warisan budaya, upaya rekonsiliasi konflik dapat menjadi lebih inklusif, mempercepat proses pemulihan, dan membentuk landasan yang kokoh untuk perdamaian yang berkelanjutan.

Selain aspek budaya, aspek agama memainkan peran sentral dalam proses resiliensi sosial masyarakat Pulau Saparua, khususnya Negeri Haria dan Negeri Porto. Kedua negeri ini adalah penganut agama Kristen, dan agama menjadi salah satu fondasi perdamaian melalui pelaksanaan ritual-ritual keagamaan. Ritual agama yang paling mencolok adalah ibadah Koinonia, sebuah bentuk ibadah yang dilakukan bersama-sama antara Negeri Haria dan Negeri Porto setiap tanggal 27 pada bulan yang berjalan. Ibadah Koinonia menjadi puncak dari program Ibadah Damai Porto Haria (POHAR) di Sektor Getsemani Betlehem dan Bethel Lithos. Keunikan dari ibadah ini terletak pada pelaksanaannya yang bergantian di Negeri Haria dan Negeri Porto. Ritual ini bukan hanya sekadar kegiatan ibadah, melainkan juga simbol konkret dari kesatuan dan perdamaian antara kedua negeri. Melalui Koinonia, masyarakat menghadirkan dan merayakan kesejatian perdamaian yang telah mereka bangun bersama-sama.

Tidak hanya Ibadah Koinonia, Natal Bersama juga menjadi bagian integral dari upaya membangun resiliensi sosial. Perayaan Natal Bersama diadakan antara Negeri Haria dan Negeri Porto dengan tujuan utama untuk mempererat tali kasih di antara keduanya. Perayaan ini menciptakan momen berharga di mana masyarakat dapat saling merayakan kebersamaan dalam semangat Natal, mengesampingkan perbedaan dan melihat satu sama lain sebagai bagian dari satu kesatuan yang lebih besar. Aspek agama tidak hanya memberikan landasan spiritual, tetapi juga menjadi sumber nilai-nilai solidaritas dan kebersamaan. Ritual-ritual keagamaan tersebut menjadi instrumen penting dalam upaya meresapi makna perdamaian, menciptakan ikatan yang kuat antarindividu dan kelompok, serta memperkuat resiliensi sosial masyarakat Pulau Saparua. Melalui penggabungan aspek budaya dan agama, mereka mampu mengatasi trauma konflik, membangun kepercayaan, dan merajut kembali kesejahteraan bersama sebagai satu komunitas yang tangguh.

NH, seorang tokoh masyarakat dari Negeri Haria, terungkap bahwa upaya membangun perdamaian antara Negeri Haria dan Negeri Porto melibatkan berbagai kegiatan yang mencakup aspek agama, kerja sama, dan hubungan masyarakat. Salah satu inisiatif yang menonjol adalah Ibadah Damai Porto Haria (POHAR), sebuah ritual ibadah yang diadakan setiap tanggal 27 pada bulan yang berjalan. NH menjelaskan bahwa POHAR menjadi momen di mana Negeri Haria dan Negeri Porto bersatu dalam kegiatan ibadah, menciptakan kerja sama antar dua komunitas yang sebelumnya terlibat dalam konflik. NH menyoroti bahwa ibadah Koinonia, yang merupakan bagian dari program Ibadah Damai POHAR, menjadi titik fokus untuk membangun kerjasama dan komitmen di antara warga kedua negeri. Setiap bulan, masyarakat Negeri Haria dan Negeri Porto secara bergantian melaksanakan ibadah ini, menciptakan ikatan spiritual yang kuat dan menguatkan tekad bersama untuk merawat damai dan menjaga bingkai persaudaraan di antara mereka. Lebih jauh, NH menyampaikan bahwa perayaan Natal Bersama pada tanggal 27 Desember juga menjadi wujud nyata dari tekad dan komitmen untuk mempererat tali kasih di antara Negeri Haria dan Negeri Porto. Perayaan ini menjadi ajang untuk membangun hubungan yang lebih dekat di hadapan Tuhan, menciptakan atmosfer kebersamaan yang mendalam dan menguatkan tekad untuk merawat perdamaian. NH juga menekankan bahwa selama 10 tahun perjalanan ini, hubungan antara Negeri Haria dan Negeri Porto semakin erat. Selain dari ibadah Damai POHAR, kegiatan ibadah lain seperti Sektor Getsemani Betlehem (GEBET) dan Bet'el Lithos (BETLIS) juga menjadi ajang kolaborasi antar sektor dari kedua negeri. Jika terjadi kesalahpahaman di antara masyarakat keduanya, pihak pemerintah dari Negeri Haria dan Negeri Porto bersama-sama berusaha menyelesaikannya.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Kosmologi negeri di Pulau Saparua, khususnya dalam Negeri Haria dan Negeri Porto, memiliki peran sentral dalam mengelola konflik sosial dan membangun resiliensi masyarakat. Konflik yang melibatkan kecemburuan sosial, persaingan hak kepemilikan tanah, dan ketegangan antara generasi muda telah menjadi fokus penelitian. Kosmologi negeri, sebagai fondasi nilai sosial yang mendalam, terbukti menjadi kunci dalam menciptakan upaya penyelesaian konflik yang berkelanjutan. Melalui tugu perdamaian, ritual agama seperti ibadah Koinonia, dan kegiatan budaya seperti tari Cakalele, masyarakat Pulau Saparua menunjukkan bahwa nilai-nilai lokal dapat menjadi dasar yang kuat untuk membangun perdamaian. Dalam konteks ini, kosmologi negeri juga berfungsi sebagai resiliensi sosial, memainkan peran penting dalam membentuk hubungan yang harmonis dan mendorong pembangunan berkelanjutan. Sebagai langkah konkret, rekomendasi untuk pemerintah sebagai pembuat kebijakan sosial mencakup dukungan terhadap program pendidikan nilai-nilai kosmologi negeri, alokasi dana untuk proyek resiliensi sosial, dan fasilitasi dialog antar masyarakat. Dengan keterlibatan aktif pemerintah dalam ritual agama dan implementasi kebijakan lingkungan berkelanjutan, diharapkan dapat tercipta kerangka kerja yang mendukung pemeliharaan kedamaian di Pulau Saparua. Dengan demikian, artikel ini memberikan pandangan baru tentang bagaimana nilai-nilai lokal dapat menjadi pilar utama dalam merespons dan mengatasi konflik sosial, membawa masyarakat menuju pembangunan berkelanjutan yang lebih baik.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Adedeji, A. O. (2022). Relevance Of Negotiation As Alternative To Violence In Resolving Deep-Rooted Conflict. *Asian Journal of Management, Entrepreneurship and Social Science*, 2(01), 154–170.
- Al Hourani, M. (2021). Randall Collins' Micro-Sociological Theory of Violence and the Palestinian Knife Intifada (2015–2016). *International Journal of Contemporary Sociology*, 58(2), 185–209.
- Alexander, J. C. (2020). Performance and Power 1. In *The new social theory reader* (pp. 179–186). Routledge.
- Alexander, J. C. (2022). Civil sphere and transitions to peace: Cultural trauma and civil repair. *International Journal of Politics, Culture, and Society*, 35(1), 85–93.
- Amri, M., Mosiba, R., & Bin-Tahir, S. Z. (2020). Interreligious Tolerance in the Perception of Maluku Muslim Society. *Jurnal Adabiyah*, 20(1), 178–195.
- Amrullah, I. Z. (2021). *Post-Conflict Reconciliation of Religious Sentiments: Peace Pioneering Women: A Case Study at Ambon City, Maluku, Indonesia*. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Ayuningtyas, D., Hapsari, D., Rachmalina, R., Amir, V., Rachmawati, R., & Kusuma, D. (2022). Geographic and socioeconomic disparity in child undernutrition across 514 districts in Indonesia. *Nutrients*, 14(4), 843.
- Bandura, A. (2015). Exercise of human agency through collective efficacy. *Current Directions in Psychological Science*, 9(3), 75–78.
- Bandura, A. (2018). *Personal and collective efficacy in human adaptation and change*. (8th ed.). Psychology Press/Erlbaum (UK) Taylor & Francis.
- Batiran, K., & Salim, I. (2020). A Tale of Two Kewangs: A comparative study of traditional institutions and their effect on conservation in Maluku. *Forest and Society*, 4(1), 81–97.
- Collins, R. (2022). *Explosive conflict: Time-dynamics of violence*. Routledge.
- Creswell, J. W. (2017). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Sage publications.
- Dandirwalu, R., & Rehy, H. Y. (2020). Tahuri: the model of Christian and Muslim peace in the Tehoru and Telutih Districts. *Research on Humanities and Social Sciences*, 10(10), 28–34.
- Erikson, E. H. (2018). *Identity and the Life Cycle* (10th ed.). WW Norton & company.
- Far, R. A. F. (2022). System Communication in Management Conflict of Natural Resources Development in Maluku Province. *Tropical Small Island Agriculture Management*, 2(1), 1–18.
- Fenanlampir, A. (2020). Conflict Management Model of Organization from Molucca's Cultural Perspective. *Journal of Southwest Jiaotong University*, 55(4).
- Gaspersz, S. G. C. (2023). Muslim-Christian and Missiological Discourses on Cultural Identity in Maluku, Eastern Indonesia. *Mission Studies*, 40(3), 391–411.
- Gross, Y. (2020). Erikson's stages of psychosocial development. *The Wiley Encyclopedia of Personality and Individual Differences: Models and Theories*, 179–184.
- Hasudungan, A. N. (2021). Muslim and Christian relations in the field of education after The Ambon-Maluku conflict (The Biggest Religious Conflict in Indonesia). *Journal of Education, Society & Multiculturalism*, 1(3), 40–54.
- Ipa, M., Laksono, A. D., & Wulandari, R. D. (2023). The Role of Travel Time on Hospital Utilization in the Islands Area: A Cross-Sectional Study in the Maluku Region, Indonesia, in 2018. *Indian Journal of Community Medicine: Official Publication of Indian Association of Preventive & Social Medicine*, 48(2), 269.
- Kadir, H. A. (2023). (Re) building Interethnic Relations Through Sharecropping in Post-Conflict Maluku. *The Asia Pacific Journal of Anthropology*, 24(2), 153–170.
- Kerebunu, F., & Fathimah, S. (2023). Conflict Resolution in the Perspective of Functional Conflict Theory (Case Study of Interreligious Relations). *ICLSSE 2022: Proceedings of the 4th International Conference on Law, Social Sciences, and Education, ICLSSE 2022, 28 October 2022, Singaraja, Bali, Indonesia*, 293.
- Kühne, O. (2020). Landscape conflicts—a theoretical approach based on the three worlds theory of Karl Popper and the conflict theory of Ralf Dahrendorf, illustrated by the example of the energy system transformation in Germany. *Sustainability*, 12(17), 6772.
- Lattu, I. Y. M. (2023). Maluku as a Cross-road of International Trade and Religions. In *Rethinking Interreligious Dialogue* (pp. 1–30). Brill Schöningh.
- Lawalata, C., Nulhaqim, S. A., Darwis, R. S., & Gunawan, W. (2022). Utilization of Informal Sources System For Strengthening Maningkamu For Conflict Resolution In The Hatuhaha Amarima Community In Haruku Island, Central Maluku Regency. *Central Asia & the Caucasus (14046091)*, 23(1).
- Leiwakabessya, J. E. M., Kasnawi, M. T., & Agustang, A. (2021). The reality of the conflict of customary lands between the land of laha and the air force in ambon city (case study customary land in the land of laha). *Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry*, 12(9).
- Matakena, F., Murwani, P., & Watloly, A. (2023). *Membangun Negeri yang Berkarakter dan Berkelanjutan*

(Ist). Alfabeta.

- Matakena, F., Watloly, A., Andi Agustang, A. A., Adam, A., & Alim, A. (2020). The Self-Concept of Ale Rasa Beta Rasa in the Orang Basudara Community in Ambon (Studies on the Community of Passo and Batumerah Country). *International Journal of Criminology and Sociology*, 9, 1306–1311.
- Matitaputty, M. I. (2023). Government Responsibility for the Practice of Marine Sasi Management in Maluku for Sustainable Marine Resources Sustainability. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 10(2), 603–611.
- Moya, J., & Goenechea, M. (2022). An approach to the unified conceptualization, definition, and characterization of social resilience. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(9), 5746.
- Mubarok, A., Almubaroq, H. Z., Surjaatmadja, S., & Risdhianto, A. (2023). Impact of Technology, Military, and Socio-Economic Welfare on Conflict in Indonesia and Japan. *International Journal Of Humanities Education and Social Sciences*, 3(2).
- Muin, A., & Rakuasa, H. (2023). Sasi Laut as a Culture of Natural Resources Conservation to Overcome the Tragedy of the Commons in Maluku Province. *International Journal of Multidisciplinary Approach Research and Science*, 1(03), 277–287.
- Nainggolan, C., Th, M., Nalle, M. S., Han, C., & Th, M. (2024). The Concept of Mercy To Promote Tolerance Among The Plurality In Indonesia. *Journal of Research Administration*, 6(1).
- Niemeijer, H. E. (2021). Conquest, colonialism, and religious conflict in the Moluccas in the early Seventeenth Century. In *Early modern toleration* (pp. 216–236). Routledge.
- Qamar, A. H. (2022). Problematising Definition of Social Resilience: A Scoping Review of Popular Definitions. *International Conference on Business, Management and Social Sciences*, 55.
- Rahawarin, Y. (2023). Dynamics of Maintaining Religious Harmony in Ambon City, Maluku Province. *West Science Social and Humanities Studies*, 1(06), 390–394.
- Rahawarin, Y., Darakay, J., Rumlus, C., & Manuputty, F. (2021). The Role of the Latupati Institution in Overcoming Religious and Social Conflicts in Maluku in 1999. *Khalifa: Journal of Islamic Education*, 5(1), 93–103.
- Ristanti, D. N. (2022). Interreligious Violent Conflict Resolution: Discoursing Communal Violence between Christians and Moslems in Poso City, Indonesia. *Hasanuddin Journal of Strategic and International Studies (HJSIS)*, 1(1), 31–38.
- Riyanto, G. (2023). Precarious Coexistence in Maluku: Fear and Trauma in Post-Conflict Christian-Muslim Relations. *Muslim Politics Review*, 2(1), 66–87.
- Ruhlessin, J. C. (2021a). Land/Forest Acquisition After the Maluku Conflict, Its Impact on Ecosobling Rights Ownership Conflict of Rights Owners and Ethics-Moral Implications of Public Policies. *Review of International Geographical Education Online*, 11(2).
- Ruhlessin, J. C. (2021b). The Position of Indigenous People and Cultural-Ethic Leadership Based Natural Resources Conflict Mediation In The Context of the Maluku Islands. *Review of International Geographical Education Online*, 11(2).
- Seidman, S., & Alexander, J. C. (2020). *The new social theory reader*. Routledge.
- Sekowski, M. (2022). Attitude toward death from the perspective of Erik Erikson's theory of psychosocial ego development: An unused potential. *OMEGA-Journal of Death and Dying*, 84(3), 935–957.
- Sienkiewicz, S. (2022). Is custom a tool for remedying or reinforcing social inequalities? New strategies for dialogue and peace in Maluku, Indonesia. *The Asia Pacific Journal of Anthropology*, 23(1), 20–39.
- Somers, X. (2020). *The Molucan conflict: just a religious conflict? A different perspective on identity dynamics in violent conflict*.
- Sumardi, J. (2021). Reconstruction of Land Exertion for Investment. *Amsir Law Journal*, 2(2), 79–90.
- Tadjoeddin, M. Z., Yumna, A., Gultom, S. E., Rakhmadi, M. F., & Suryahadi, A. (2021). Inequality and violent conflict: new evidence from selected provinces in Post-Soeharto Indonesia. *Journal of the Asia Pacific Economy*, 26(3), 552–573.
- Wahidin, M., Hidayat, M. S., Arasy, R. A., Amir, V., & Kusuma, D. (2020). Geographic distribution, socio-economic disparity and policy determinants of smoke-free policy adoption in Indonesia. *The International Journal of Tuberculosis and Lung Disease*, 24(4), 383–389.
- Watloly, A. (2022). *Kosmologi Pulau Kecil Masela di Bibir Perbatasan Negara*. Penerbit Kanisius.
- Yunanto, S., & Damayanti, A. (2021). Religion and Power: Comparing Political Landscape in the Religious Conflicts in Poso and Maluku. *Advances in Politics and Economics*, 5(1), 99–114.